



Undang-undang (UU) baru yang menyasar pemberi kerja yang tidak jujur

UU baru akan melindungi migran dari eksploitasi di tempat kerja dengan menerapkan hukuman berat bagi yang menyalahgunakan peraturan visa untuk mengeksploitasi pekerja migran sementara.

Peraturan berdasarkan Undang-Undang Penguatan Kepatuhan Pemberi Kerja (Strengthening Employer Compliance Act) akan mencegah supaya pemberi kerja yang tidak jujur tidak menggunakan peraturan visa seseorang, atau status imigrasi mereka yang melanggar hukum, untuk mengeksploitasi mereka di tempat kerja. Hukuman pidana termasuk 2 tahun penjara dan/atau denda 360 unit (saat ini senilai \$118.800). Hukuman perdata adalah denda 240 unit (saat ini senilai \$79.200).

Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024 dan mencakup hal-hal terkait pekerjaan dan di luar pekerjaan yang mungkin timbul di tempat kerja. Bisa juga mencakup situasi seperti seorang pekerja ditekan untuk menyerahkan paspornya, menerima tempat tinggal yang tidak memadai, melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, atau melanggar batasan visa kerja. Aturan baru ini juga berlaku dalam situasi ketika pekerja migran dibayar di bawah standar, atau pemberi kerja mengancam untuk membatalkan visa mereka (pemberi kerja tidak dapat membatalkan visa).

Beberapa contoh perilaku dalam rantai ketenagakerjaan yang mengeksploitasi migran dan melanggar aturan adalah sebagai berikut.

Pemberi kerja memaksa migran sementara untuk melanggar ketentuan visa

Aturan baru ini membidik pemberi kerja dan penyedia pihak ketiga yang menekan pemegang visa sementara untuk melanggar ketentuan terkait pekerjaan dalam visanya.

Studi kasus

Chen adalah seorang siswa internasional di sebuah universitas Australia dan ia bekerja di sebuah pompa bensin. Chen menerima jam kerja di akhir pekan untuk membantu menutupi biaya hidupnya.

Namun pekerjaan tambahan tersebut membuat dia harus bekerja lebih dari 48 jam yang diperbolehkan oleh visa pelajarinya dalam dua minggu. Manajer Chen mengetahuinya, tapi ia tetap diberi roster tambahan. Ia juga menggaji Chen di bawah standar.

Chen mendiskusikan soal gaji di bawah standar tersebut kepada bosnya. Bosnya bilang bahwa kalau Chen tidak tutup mulut maka dia akan melaporkan Chen ke pihak berwenang karena bekerja melebihi batas yang diperbolehkan dan visanya dapat dibatalkan. Menggaji seseorang di bawah standar dan mengizinkan seseorang bekerja dengan melanggar persyaratan visa merupakan suatu tindakan melanggar hukum. Sesuai peraturan baru ini, hal tersebut akan memicu diperhitungkannya pelanggaran tambahan.

Perusahaan perekrut tenaga kerja mengeksploitasi migran tidak berdokumen

Aturan baru ini menargetkan pemberi kerja dan penyedia layanan pihak ketiga yang menekan warga negara asing tanpa visa sah untuk menerima pekerjaan.

Studi kasus

123 adalah penyedia tenaga kerja yang menyediakan pekerja untuk usaha holtikultura di Australia. Sally yang visanya sudah kedaluwarsa adalah seorang pekerja di sana. Perusahaan itu tahu bahwa Sally tidak punya visa sah di Australia, tetapi mereka tetap mempekerjakan Sally.

Sally segera menyadari bahwa ia digaji lebih rendah dari rekan kerjanya, sehingga ia mengajukan keluhan. Perusahaan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak boleh bekerja dan mengancam akan melaporkannya ke pihak berwenang jika dia mengeluh.

Penyedia tenaga kerja itu sudah melanggar hukum dengan mengizinkan Sally bekerja tanpa visa yang sah, dan membayarnya di bawah standar. Berdasarkan peraturan pelanggaran baru ini, penyedia tenaga kerja tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana tambahan.

Pemberi kerja menggunakan status visa sementara untuk mengeksploitasi

Peraturan baru ini menyasar pemberi kerja dan penyedia layanan pihak ketiga yang menekan pemegang visa sementara untuk menerima atau menyetujui pengaturan kerja – yang pada dasarnya menggunakan status visa sementara mereka (atau keinginan untuk mengajukan permohonan visa di masa depan) untuk mengeksploitasi mereka.

Studi kasus

Nitia adalah seorang pekerja IT muda yang disponsori untuk bekerja di Australia. Ia sangat senang akan adanya kemungkinan mendapat hak tinggal tetap (permanent residency) di Australia nantinya. Tidak lama setelah pekerjaan barunya dimulai, manajernya melontarkan komentar seksual yang tidak pantas dan menyentuh Nitia tanpa izin saat berbicara dengan Nitia.

Ketika Nitia menyampaikan masalah ini kepada bosnya, beliau berkata bahwa Nitia tidak akan berpeluang disponsori untuk mendapat visa permanen jika ia menimbulkan masalah. Pelecehan seksual merupakan tindakan melanggar hukum, dan berdasarkan peraturan baru ini, atasan Nitia dapat dikenakan tuntutan pidana tambahan karena menggunakan status visa Nitia untuk mengeksploitasinya.



[Hak pekerja migran](#)



[UU eksploitasi pekerja migran yang baru](#)